



SKRIPSI

Judul:

INTERPRETASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
KREDITOR DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-
Pailit/2024)

Disusun oleh:

TOBIAS WILLIAM REUVEN SIBARANI
NIM. 205210170

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**INTERPRETASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
KREDITOR DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-
Pailit/2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

TOBIAS WILLIAM REUVEN SIBARANI

NIM. 205210170

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2025

Pengesahan

Nama : TOBIAS WILLIAM REUVEN SIBARANI
NIM : 205210170
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : INTERPRETASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)
Title : INTERPRETATION OF LEGAL PROTECTION OF CREDITORS IN THE BANKRUPTCY PROCESS BASED ON LAW NO 37 OF 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND DELAY OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (Study of Supreme Court Decisions Number 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.,Dr.
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

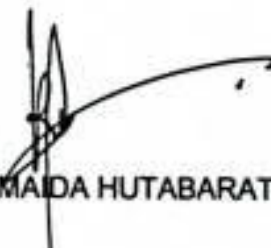
Pembimbing:

GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : TOBIAS WILLIAM REUVEN SIBARANI
NIM : 205210170
Program Studi : HUKUM
Judul : INTERPRETASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
KREDITOR DALAM PROSES KEPAILITAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-
Pailit/2024)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2025

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



ABSTRAK

Pailit merupakan situasi di mana debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih melalui keputusan pengadilan. Keadaan ini mencerminkan ketidakmampuan finansial debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sehingga memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Proses hukum terkait kepailitan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun debitor. Kepastian hukum ini memastikan kreditor mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, sementara debitur memperoleh solusi yang adil terhadap permasalahan keuangannya. Pada penelitian ini penulis mengkaji dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam proses Kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Bagaimana Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU). Tujuan penelitian penulis yaitu bertujuan untuk Mencari tahu perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam proses Kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Telah Sesuai Aturan Perundang Undangan Yang Berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Penelitian hukum sendiri merupakan upaya terstruktur untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena hukum. Analisis pada penelitian ini akan mencakup rincian mengenai proses kepailitan, termasuk tahapan kasasi di Mahkamah Agung, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan dan penanganan kasus tersebut di pengadilan. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi interpretasi perlindungan hukum bagi kreditor berdasarkan UU PKPU dalam konteks kasus PT Multi Inti Karya. Fokus utama analisis ini adalah mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor selama proses kepailitan serta menilai sejauh mana penerapan hukum tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, PKPU, Kepailitan.

ABSTRACT

Bankruptcy is a situation where the debtor is declared unable to pay debts that have matured and can be collected through a court decision. This situation reflects the financial inability of the debtor to fulfill his obligations to creditors, so that it requires resolution through legal channels. The legal process related to bankruptcy has an important role in maintaining economic stability while providing legal certainty for both parties, both creditors and debtors. This legal certainty ensures that creditors receive protection for their rights, while debtors obtain a fair solution to their financial problems. In this study, the author examines two problem formulations, namely How is the legal protection for Creditors in the Bankruptcy process based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, and How are the Legal Considerations of the Judex Facti Panel of Judges of the Central Jakarta Commercial Court in accordance with the Applicable Provisions of Law? (Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU). The purpose of the author's research is to find out the legal protection for Creditors in the Bankruptcy process according to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, and to find out the Legal Considerations of the Judex Facti Panel of Judges of the Central Jakarta Commercial Court Have Complied with Applicable Laws and Regulations. This research uses a normative legal method, Legal research itself is a structured effort to understand and analyze various legal phenomena. The analysis in this study will cover details regarding the bankruptcy process, including the cassation stages at the Supreme Court, to provide a comprehensive picture of the development and handling of the case in court. In addition, this study will evaluate the interpretation of legal protection for creditors based on the PKPU Law in the context of the PT Multi Inti Karya case. The main focus of this analysis is to examine the legal protection provided to creditors during the bankruptcy process and to assess the extent to which the application of the law is in accordance with applicable laws and regulations.

Key Word: Legal protection, creditor, PKPU, Bankruptcy

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Interpretasi terhadap Perlindungan Hukum kreditor dalam Proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)”** dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala, namun berkat bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya permasalahan kepailitan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan Hukum terhadap kreditor dalam proses kepailitan, pertimbangan hukum *judex facti* majelis hakim, serta penyelesaian utang-piutang dalam dunia bisnis yang memerlukan pengkajian mendalam dari perspektif hukum. penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua atas doa serta dukungannya, kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang berharga, serta kepada teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai referensi akademik maupun sebagai bahan pertimbangan dalam praktik hukum terkait kepailitan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, serta dewan penguji proposal skripsi;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., S.S., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta arahan kepada penulis dalam Menyusun proposal hingga karya skripsi ini;
5. Bapak Prof. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku dewan penguji proposal skripsi;
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan selama di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Kepada Ibu Lucia Dyah, selaku orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
8. Shendy Malau, selaku partner yang membantu penulis selama proses pengerjaan karya skripsi ini;
9. Seluruh karyawan administrasi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dalam mengurus proses akademik maupun non akademik;
10. Seluruh rekan-rekan kuliah Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya skripsi ini;
11. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam bentuk apapun selama proses penyusunan karya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masi jauh dari kata sempurna, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia akademik dan masyarakat luas.

Jakarta, 3 Januari 2025

Penulis

Tobias William Reuven Sibarani

Pernyataan

Nama : TOBIAS WILLIAM REUVEN SIBARANI
NIM : 205210170
Program Studi : HUKUM
Judul : INTERPRETASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
KREDITOR DALAM PROSES KEPAILITAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-
Pailit/2024)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03-Januari-2025
Yang menyatakan



TOBIAS WILLIAM REUVEN SIBARANI
NIM. 205210170

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	6
C. Kerangka Konseptual	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II KERANGKA TEORITIS	28
A. Teori Perlindungan Hukum	28
B. Teori Penafsiran Hukum	29
C. Teori Hermeneutika	32
D. Teori Wanprestasi	33
E. Teori Perjanjian	34
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	36
A. Kasus Posisi	36

B. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst	39
C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024	43
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	48
A. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam proses Kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	48
B. Pertimbangan Hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengacu pada Ketentuan Perundang-Undangan Yang berlaku (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU)	69
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
Daftar Pustaka	83
Lampiran	87

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jumlah Utang termohon pailit	15
---------	--------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PT	: Perseroan Terbatas
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
MA	: Mahkamah Agung
UUK	: Undang-undang Kepailitan
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran III : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran IV : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran V : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran VI : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran VII : Letter of acceptance (LOA) Sinta 4
- Lampiran VIII : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran IX : Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus Pailit/2024